BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, telah mendorong organisasi sektor publik di Indonesia pada tingkat pusat dan daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).

Upaya dalam menciptakan akuntabilitas publik, pemerintah telah menetapkan regulasi yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada pemberi amanat (Setyowati *et al*, 2016).

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan pada satu periode kepada para *stakeholders.* Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif

berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Apabila informasi yang terkadung dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, jika tidak memenuhi kriteria maka akan mengakibatkan terjadinya potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, tidak hemat, tidak efisien, dan tidak efektif (Surastiani & Handayani, 2015).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahun mendapatkan penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas (Nurillah & Muid, 2014).

Fenomena terkait dengan kualitas pelaporan keuangan Kabupaten Bantul, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Bantul (Pemkab Bantul) pada tanggal 7 Juni 2017. Namun, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2016, masih ditemukan sejumlah catatan untuk Pemkab Bantul. Sebagai contoh, Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap

perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari (Sidik, 2017).

Penyusunan laporan keuangan daerah sampai saat ini masih banyak mengalami kendala dalam proses penyusunan. Kompetensi sumber daya manusia menjadi permasalahan yang paling mendasar dalam penyusunan laporan keuangan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Banyak pihak yang diberikan amanah atau tanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang bukan dari jurusan akuntansi sebagai bidang keahliannya. Hal tersebut menjadi kendala dikarenakan pegawai pada masing-masing SKPD dinilai belum siap dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kaidah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga kualitas laporan keuangan berkurang (Eriva, Islahuddin, & Darwanis, 2013).

Proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah perlu mendapatkan dukungan dari teknologi agar penyusunannya sesuai dengan perundang-undangan (Arfianti, 2011). Peningkatan total Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) meningkat dengan luar biasa dari tahun ke tahun. Dari sisi akuntansi, total volume yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan meningkatnya juga volume transaksi keuangan di pemerintahan yang semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, dengan adanya peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan kompleks,

pemanfaatan teknologi inofrmasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah sangat diperlukan (Sugijanto, 2002).

Menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik, diperlukan adanya mekanisme pengawasan melalui Sistem Pengendalian Intern (SPI). Dampak dari kurangnya pengawasan yang menandakan lemahnya SPI mengakibatkan terjadinya kelalaian dalam pembuatan laporan keuangan daerah, sehingga tidak tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan, lemahnya komitmen terhadap kompetensi, tidak optimalnya kegiatan identifikasi risiko, lemahnya pengendalian fisik atas aset serta pencatatan transaksi yang tidak akurat dan tidak tepat waktu (Trisaputra, 2013).

Penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pada tahun 2015, setiap instansi pemerintahah diwajibkan menyusun LKPD sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Moermahdi Soerja Djanegara dalam sidang paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD DIY TA 2015, menyatakan bahwa bahwa berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tahun 2015 merupakan tahun pertama pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual. Dengan penerapan LKPD berbasis akrual, pemda dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban serta kekayaannya, hasil operasi serta realisasi anggaran dan sisa anggaran lebihnya.

Dengan LKPD berbasis akrual ini pemda telah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel dan juga memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah (BPK, 2016).

Penerapan standar akuntansi di setiap entitas pelaporan dalam hal ini pemerintah daerah, diwajibkan untuk melaporan segala upaya yang dilakukan serta memaparkan hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan yang berjalan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan guna kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparasi, keseimbangan antar generasi serta evaluasi kinerja. Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan baik apabila berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan. Kenyataannya, penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ternyata dinilai belum efektif saat ini. Parna dalam Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas efektifitas upaya pemerintah daerah dalam implementasi SAP berbasis akrual tahun 2014 dan 2015 triwulan III, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, serta Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dinilai belum sepenuhnya efektif. (BPK, 2015).

Penerapan Sistem Akuntasi Keuangan Daerah (SAKD) juga memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain

dibutuhkan dalam mengelola informasi akuntansi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) mampu menghasilkan keluaran data berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sistem akuntansi mampu memberikan pengetahuan atas pengolahan informasi akuntansi sejak data direkam dalam dokumen hingga laporan dihasilkan (Bastian, 2007).

Beberapa penelitian yang menganalisis mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Antara lain oleh Surastiani & Handayani (2015) dengan menggunakan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal sebagai variabel independen. Hasil dari penelitian tersebut adalah kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Salatiga. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Nurillah & Muid (2014), yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Murapi (2016) serta Yuliani & Agustini (2016) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang sama dilakukan oleh Nurillah & Muid (2014), serta Surastiani &

Handayani (2015), yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil temuan diatas menunjukkan adanya inkonsisten hasil antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Oleh karena itu, penelitian dengan topik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ini dapat diteliti kembali agar mendapatkan hasil yang konsisten.

Penelitian ini merupakan duplikasi dari penelitian Nurillah & Muid (2014) serta Pujanira & Taman (2017). Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel, dimana penelitian yang dilakukan Nurillah & Muid (2014) mengunakan empat variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern. Sedangkan pada penelitian ini akan ditambahkan satu variabel yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan yang diambil dari penelitian Pujanira & Taman (2017). Selain itu penambahan variabel independen yang membuat penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya adalah populasi dari penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, makan penulis akan mengangkat penelitian ini dengan judul **"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul)"**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dibentuk suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu penelitian hanya dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bantul dengan responden pegawai bagian keuangan disetiap instansi.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka ujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

1 Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi di Indonesia khususnya pada pemerintahan, dan memberikan wawasan kepada pihak Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam upaya pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi keuangan dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

2 Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan pengetahuan akuntansi khusunya pemerintahan dan sebagai rujukan untuk penelitian berikutnya.

1.6 Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka

Berisi tentang logika teoritis, telaah pustaka, hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran teoritis.

Bab III Metode Penelitian

Berisi tentang pemilihan sampel, pengumpulan data, pengukuran variabel, metode analisis data, hipotesa operasional, uji kualitas data, uji analisis data dan pengujian hipotesa.

Bab IV Analisis Data

Berisi tentang karakteristik responden, hasil uji validitas dan reliabilitas, analisis regresi linear, hasil uji asumsi klasik, hasil pengujian hipotesis, pembahasan uji hipotesis dan pembahasan.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Berisi tentang kesimpulan yang ditarik dari pembahasan sebelumnya, keterbatasan, implikasi serta memberikan saran.